

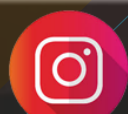
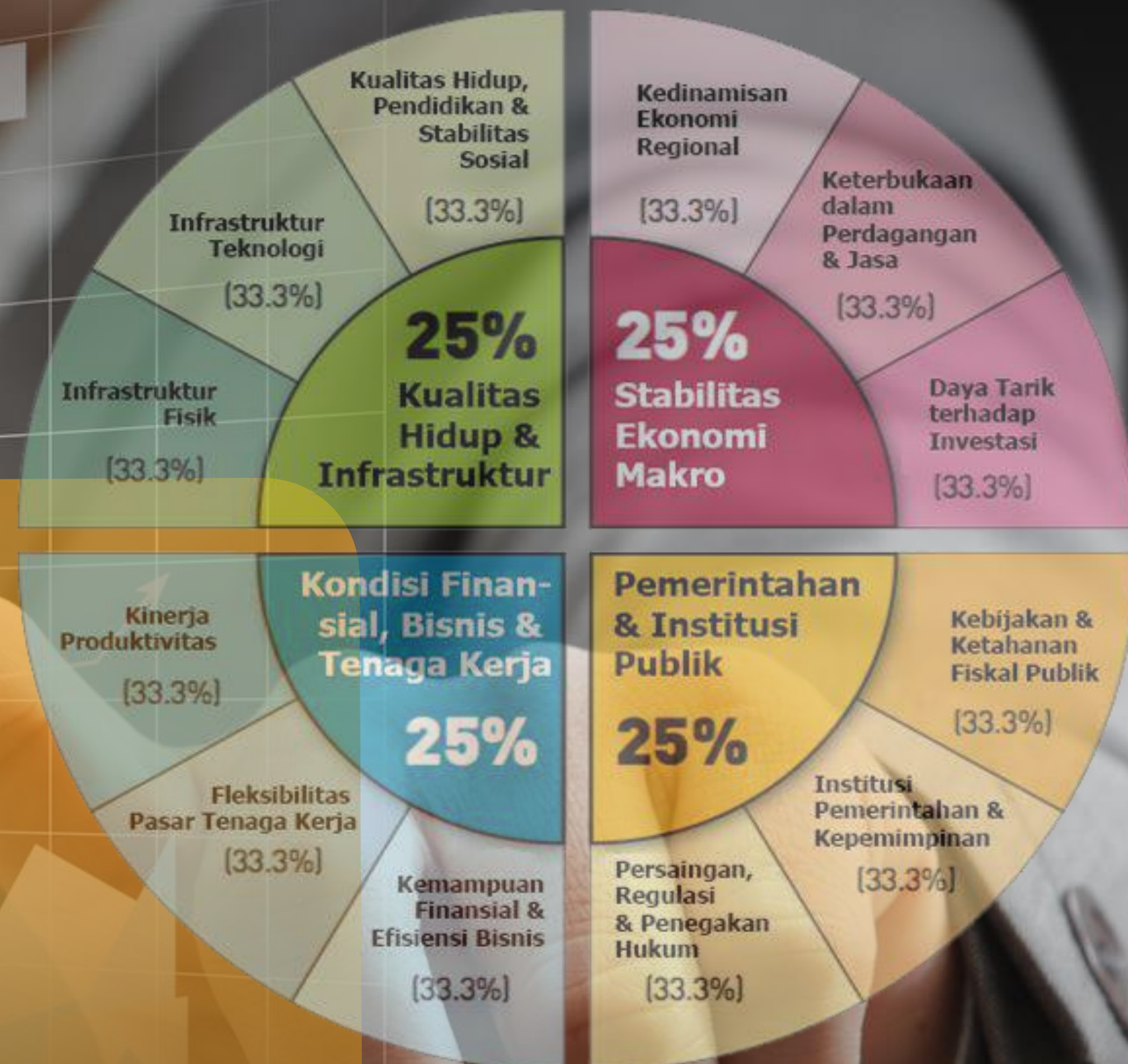


PENINGKATAN DAYA SAING PROVINSI LAMPUNG

(Rebranding Potensi dan Keunggulan Daerah)

BALITBANGDA PROVINSI LAMPUNG

Jl. Kantor Pos No.3 Gunung Mas, Telukbetung,
Bandar Lampung



DAYA SAING

Definisi



(Porter, 2000)

Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan **kemampuan** suatu perusahaan, kota, daerah, wilayah atau negara dalam **mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif** secara berkelanjutan



(Camagnni, 2002)

Daya Saing Daerah merupakan salah satu isu sentral, terutama dalam rangka mengamankan stabilitas ketenagakerjaan, dan memanfaatkan integrasi eksternal (kecenderungan global), serta **keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan dan kemakmuran lokal**



Konsep Daya Saing

Secara mendasar konsep daya saing dipahami sebagai *"kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global (Competitive advantages) untuk peningkatan kesejahteraan hidup rakyat yang nyata, berkelanjutan serta secara politis, sosial dan budaya dapat diterima oleh seluruh masyarakat"*.





KENAPA HARUS DAYA SAING ???





Kenapa Harus Daya Saing?



Nawa Cita Butir Ke Enam

Dinyatakan: perlu dilakukan **peningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional** sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Nawa cita menyatakan dengan tegas mengenai pentingnya produktivitas dan daya saing dalam pembangunan ekonomi di Indonesia



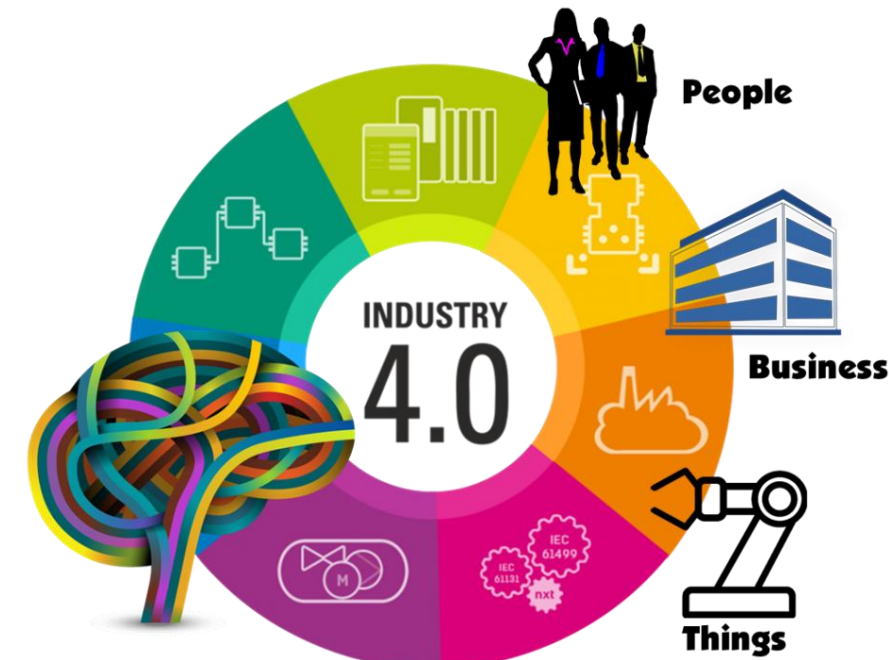
RPJMD Provinsi Lampung

Dalam Misi ke-3: **Pengembangan IPTEK dan Inovasi**



RPJMD Kabupaten/Kota

RPJMD Kabupaten Kota banyak **membranding** istilah **Daya Saing dalam Visi**, tetapi belum memahami secara utuh tentang daya saing tersebut.



Era Revolusi Industri 4.0

Competitiveness
Keniscayaan

BEBERAPA KAJIAN DAYA SAING YANG SUDAH DILAKUKAN

1 BI & Univ Padjajaran

Bank Indonesia bekerjasama dengan **Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran** menyusun profil dan pemetaan daya saing ekonomi daerah **kabupaten/kota** di Indonesia.

2

European Commission

European Commission menyusun *Regional Competitiveness Index*

3 IMD

Institute for Management Development (IMD) setiap tahunnya menerbitkan *The World Competitiveness Yearbook* yang didasarkan pada 4 faktor utama

4

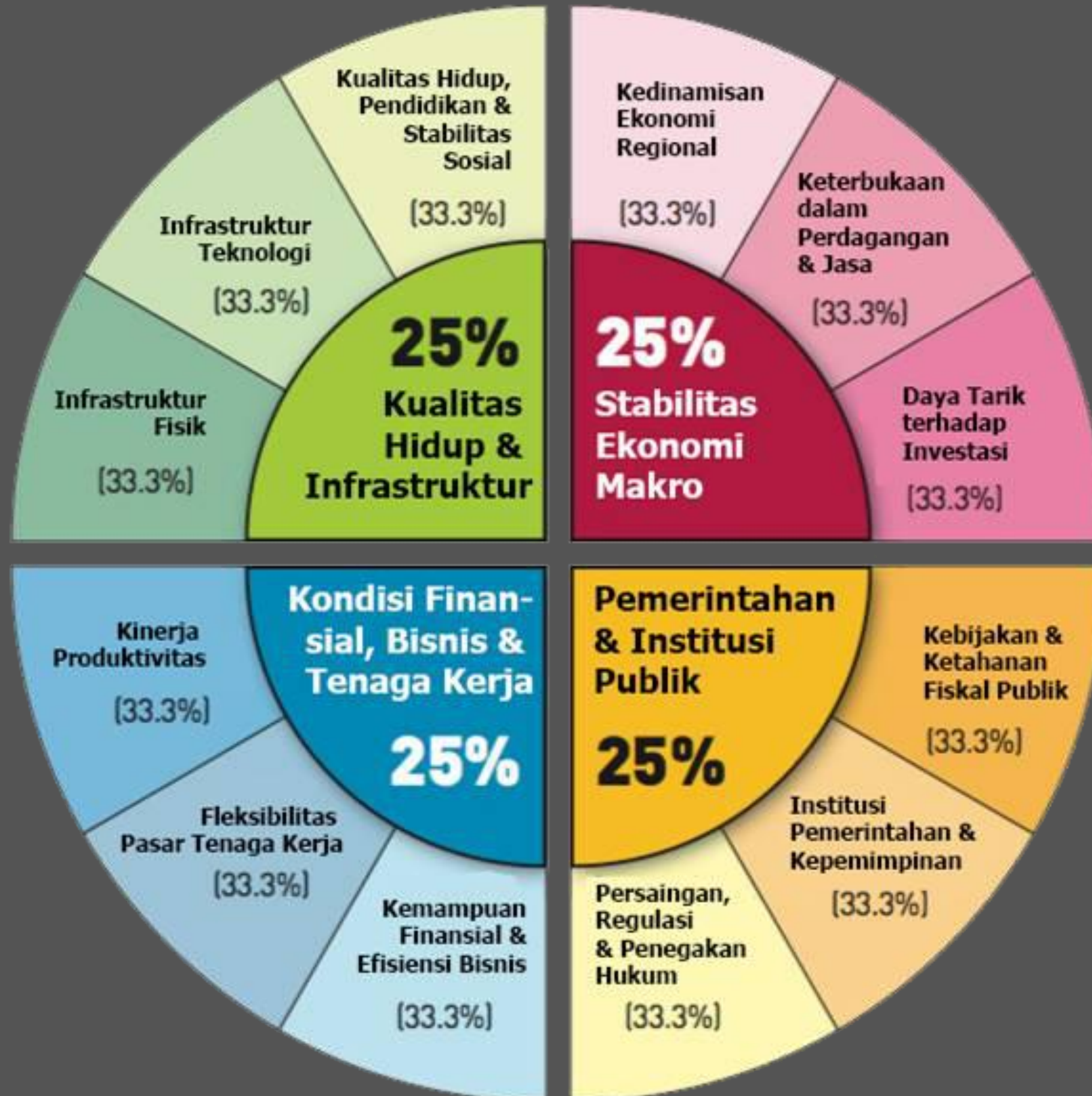
World Economic Forum

World Economic Forum menyusun peringkat daya saing **negara-negara di dunia** dalam *Global Competitiveness Index* berdasarkan 12 (dua belas) pilar penting

5 ACI (the Asia Competitiveness Institute)

ACI - National University Singapore, memotret tingkat daya saing **seluruh provinsi** di Indonesia, dilakukan setiap tahun (data series), dengan total 100 Indikator

KONSEPSI DAYA SAING



Definisi

ACI mengadopsi pemahaman tentang “daya saing” ekonomi yang komprehensif, mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu daerah untuk mencapai pembangunan ekonomi yang tinggi dan inklusif, dalam kurun waktu yang cukup panjang.

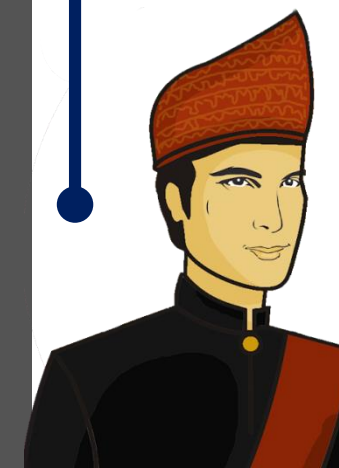
Metode Perhitungan Skor Standar

4 Aspek Utama (Environment)

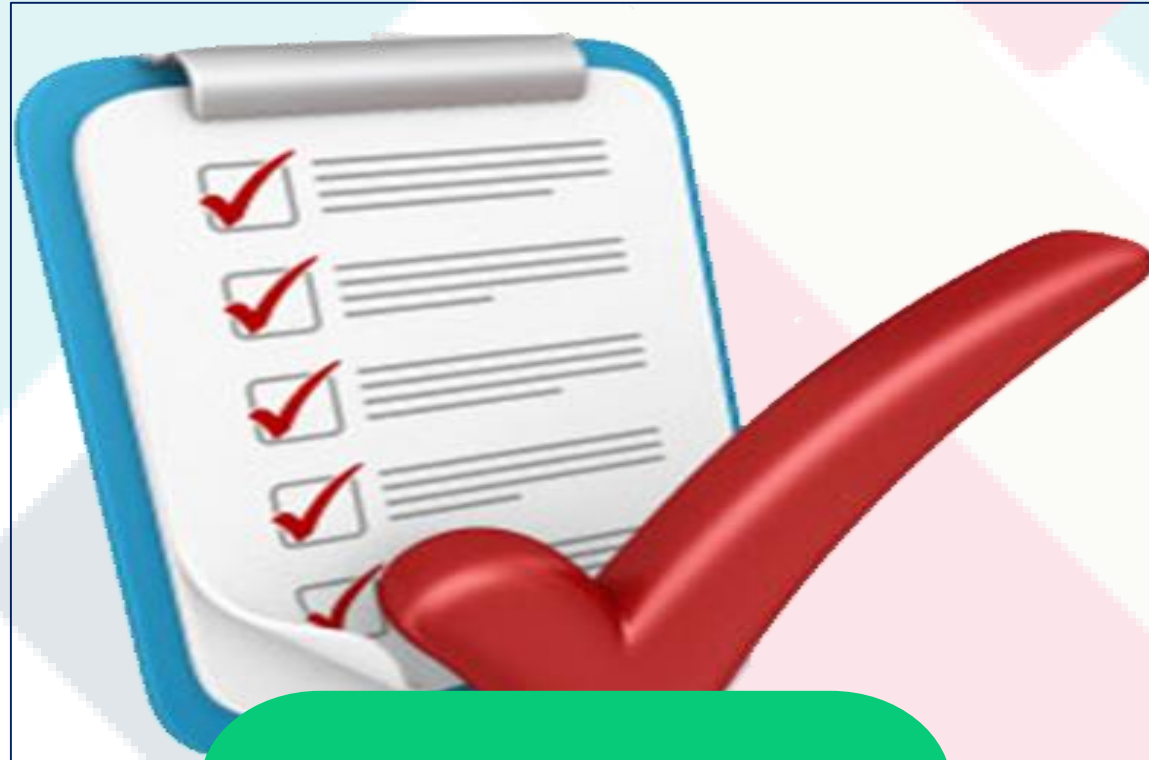
- Stabilitas Ekonomi Makro (SEM)
- Pemerintah & Institusi Publik (PIP)
- Kondisi Finansial, Bisnis & Tenaga Kerja (KBFT)
- Kualitas Hidup dan Perkembangan Infrastruktur (KHPI)

Dibagi menjadi 12 sub –aspek dengan 100 pengukuran

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| □ 0 (nol) | = sama dengan rerata nasional |
| □ - (negatif) | = di bawah rerata nasional |
| □ + (positif) | = di atas rerata nasional |



TUJUAN, SASARAN, DAN MANFAAT DAYA SAING DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH



TUJUAN

Rekomendasi berupa indikator-indikator pembangunan serta target-targetnya untuk **RPJMD** Provinsi Lampung Tahun **2019-2024**



SASARAN

- ✓ Identifikasi sektor-sektor pembangunan yang memiliki daya ungkit tinggi
- ✓ Identifikasi prospek peningkatan daya saing provinsi Lampung 2014-2019

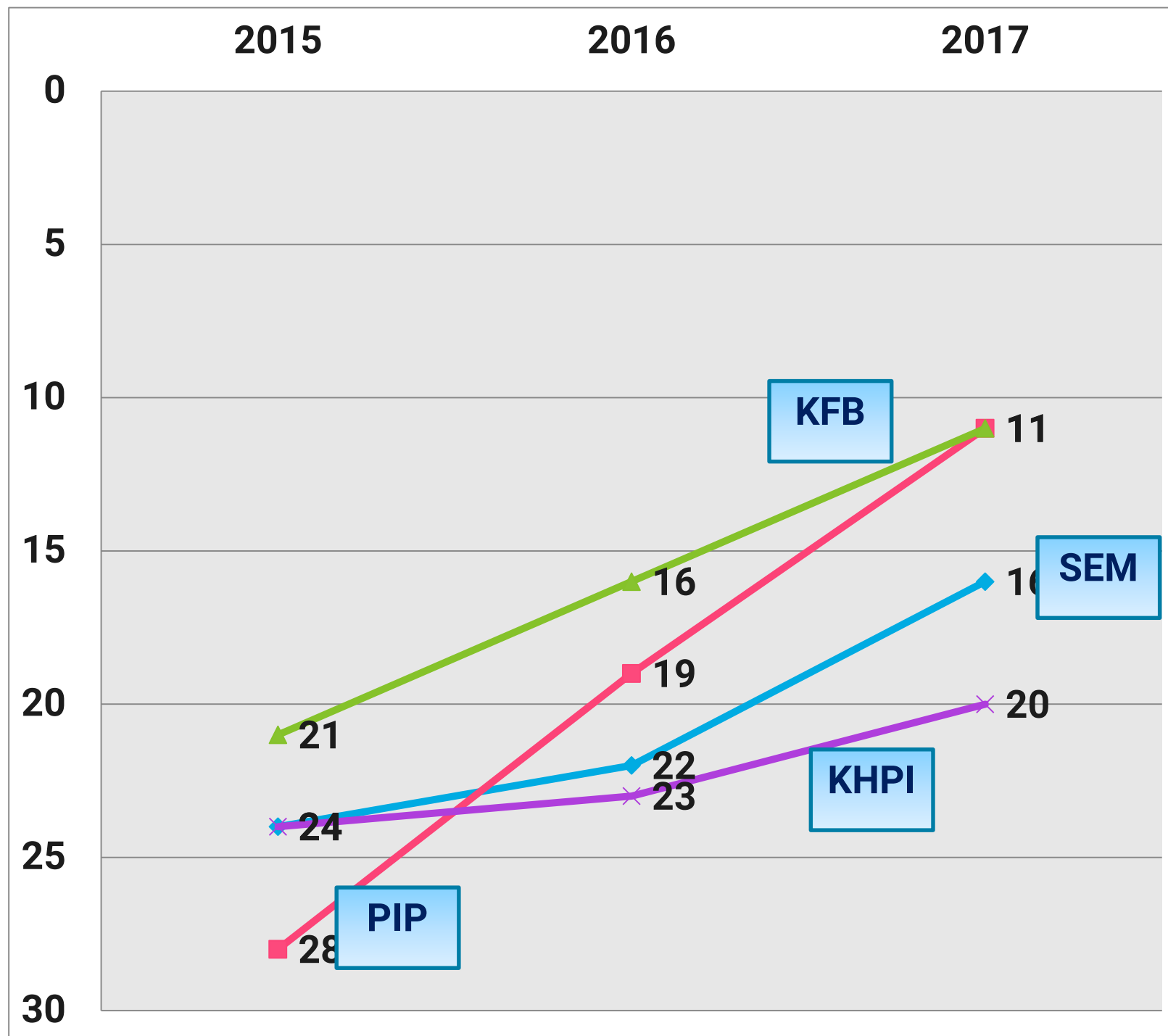


MANFAAT

1. Mengetahui Posisi Daya Saing Lampung terhadap Provinsi lain di Indonesia
2. Menjadi acuan bagi investor untuk melakukan Investasi

NILAI DAN PERINGKAT DAYA SAING PROVINSI LAMPUNG

Berdasarkan 4 Aspek Penilaian ACI



Tahun	SEM	PIP	KFBT	KHPI	SEM	PIP	KFBT	KHPI
	NILAI				PERINGKAT			
2015	-0,5454	-0,9801	-0,4157	-0,4797	24	28	21	24
2016	-0,494	-0,182	-0,028	-0,33	22	19	16	23
2017	-0,274	0,603	0,065	-0,141	16	11	11	20

Keterangan :

SEM : Stabilitas Ekonomi Makro;

PIP : Pemerintahan dan Institusi Publik;

KFBT :Kondisi Finansial, Bisnis, dan Tenaga Kerja;

KHPI : Kualitas Hidup dan Perkembangan Infrastruktur.

Indikator Terkuat dan Terlemah (*20% indicators*) Tahun 2017

Rank	20% Strongest Indicator	Score	Environment
1	Kualitas Pendidikan	1,6527	KHPI
2	Tingkat Efisiensi Pemda	1,6463	PIP
3	Kinerja Perusahaan	1,5444	KFBT
4	Hubungan Tenaga Kerja	1,3729	KFBT
5	Kemudahan Transaksi di Bank	1,201	KFBT
6	Kualitas Kesehatan	1,1628	KHPI
7	Kualitas Infrastruktur Teknologi	1,1529	KHPI
8	Tingkat Kriminalitas	1,1519	PIP
9	Kualitas Peraturan Daerah	0,9857	PIP
10	Kapasitas Sumber Daya Manusia di Perusahaan	0,9144	KFBT
11	Rasio Murid per Guru (Menengah Atas)	0,8337	KHPI
12	Gairah Kompetisi dan Kolaborasi	0,8014	PIP
13	Ketersediaan dan Keterjangkauan Sarana Umum	0,7839	KHPI
14	Rasio Gini	0,669	KHPI
15	Kapasitas Kepemerintahan Provinsi	0,6489	PIP
16	Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Dasar)	0,6218	KHPI
17	Kualitas Infrastruktur Fisik	0,5921	KHPI
18	Akuntabilitas dan Inklusivitas Pemda	0,5537	PIP
19	Kapasitas Peralatan Perusahaan	0,5408	KFBT
20	Rasio Murid per Guru (Sekolah Menengah Pertama)	0,535	KHPI

Rank	20% Weakness Indicator	Score	Environment
81	Angka Partisipasi Sekolah (Menengah Atas)	-0,4404	KHPI
82	Akses Internet di Rumah	-0,4608	KHPI
83	Produktivitas Keseluruhan, nonmigas	-0,4627	KFBT
84	Jumlah Kepemilikan Komputer	-0,5085	KHPI
85	Rata-rata lama sekolah	-0,521	KHPI
86	PDRB Pr Kapita	-0,5504	SEM
87	Produktivitas Industri Sekunder	-0,5504	KFBT
88	Rata-rata Penanaman Modal Asing dalam 3 tahun terakhir	-0,5591	SEM
89	Produktivitas Keseuruhan	-0,5616	KFBT
90	Rasio Murid Per Guru (Sekolah Dasar)	-0,5664	KHPI
91	Rasio Penduduk Per Pekerja Medis	-0,6205	KHPI
92	Produktivitas Industri Tersier	-0,7085	KFBT
93	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-0,7576	KHPI
94	Akses Internet dengan telepon Genggam	-0,8777	KHPI
95	Pertumbuhan Penduduk	-0,9012	KHPI
96	Penduduk Perkotaan	-0,9277	KHPI
97	Akses Internet di Kantor	-0,9296	KHPI
98	Jumlah Kepemilikan Laptop	-1,3915	KHPI
99	Jumlah Rumah Tangga dengan Jaringan Pipa Air	-1,3926	KHPI
100	Penduduk per jumlah cabang/kantor Bank	-2,6068	KFBT

ANALISIS INDIKATOR DAYA SAING DI BAWAH RERATA NASIONAL

Stabilitas Ekonomi Makro

- PDRB
- PDRB nonmigas
- Pertumbuhan PDRB
- PDRB perkapita
- PDRB perkapita, nonmigas
- PDRB industri sekunder
- PDRB industri tersier
- Pembentukan modal tetap domestik bruto
- Ekspor
- Ekspor nonmigas
- Impor
- Impor nonmigas
- Rata-rata penanaman modal asing dalam 3 tahun terakhir
- Rata-rata penanaman modal domestik dalam 3 tahun terakhir

Pemerintahan dan Institusi Publik

- Pendapatan total pemda
- Pendapatan pajak pemda
- Pengeluaran pemda
- Keseimbangan fiskal
- Tingkat kebersihan dari korupsi
- Tingkat keamanan

Kondisi Finansial, Bisnis, dan Tenaga Kerja

- Total tabungan dan deposito di bank
- Total pinjaman bank
- Jumlah cabang/kantor bank
- Penduduk per jumlah cabang/kantor bank
- Jumlah pekerja di sektor sekunder
- Jumlah pekerja di sektor tersier
- Produktivitas keseluruhan
- Produktivitas keseluruhan, nonmigas
- Produktivitas industri primer
- Produktivitas industri sekunder
- Produktivitas industri tersier

Kualitas Hidup dan Perkembangan Infrastruktur

- Pertumbuhan penduduk
- Penduduk perkotaan
- Bongkat muat kargo di pelabuhan domestik
- Jumlah penumpang pesawat domestik
- Jumlah penumpang pesawat internasional
- Jumlah RT dengan jaringan pipa air
- Jumlah sambungan telepon
- Jumlah kepemilikan komputer
- Jumlah kepemilikan laptop
- Akses internet di kantor
- Akses internet dengan telepon genggam
- Rata-rata lama sekolah
- Angka partisipasi sekolah (MA)
- IPM
- Rasio penduduk per fasilitas kesehatan
- Rasio penduduk per pekerja medis

4. Kesesuaian RPJMD & Daya Saing ACI

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Kinerja awal periode RPJMD	Target		Kesesuaian dengan Aspek Utama Daya Saing menurut ACI
		2015	2018	2019	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
	Pertumbuhan PDRB/LPE	5,78%	6,75-7,00%	7,00-7,50%	SEM
	Indeks Gini	0,36	0,32	0,32	KHPI
	PDRB per kapita (berlaku)	25,77	37,25	39,45	SEM
	PDRB atas Harga Konstan (Juta Rupiah)	180.636.658	244.478.945	262.203.722	SEM
	PDRB atas Harga Berlaku (Juta Rupiah)	204.402.787	297.432.755	318.996.629	SEM
	Jumlah koperasi aktif	2.830	3.170	3.250	
	Jumlah UMKM	307.740	404.291	414.398	
	Jumlah wisatawan nusantara	3.855.559	6.335.493	7.155.495	
	Jumlah wisatawan mancanegara	85.305	139,922	153,914	

Kesesuaian RPJMD & Daya Saing ACI

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Kinerja awal periode RPJMD	Target		Kesesuaian dengan Aspek Utama Daya Saing menurut ACI
		2015	2018	2019	
2. Fokus Kesejahteraan Sosial					
2.1.	Pendidikan				
	Angka Melek Huruf	98,45	97,5	98	KHPI
	Angka rata-rata Lama Sekolah	7,44	7,65	7,7	KHPI
	Angka Kelulusan (%)	100	100	100	KHPI
	Angka melanjutkan SMP ke SMA (%)	70	95	100	KHPI
	Angka melanjutkan SMA ke PT (%)	45	70	75	KHPI
	Angka Partisipasi Murni				
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,37	95,7	95,75	KHPI
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	74,62	76,7	77,1	KHPI
	- Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	53,38	68	70	KHPI
	Angka Partisipasi Kasar				
	- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	110,7	112,03	112,08	KHPI
	- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	85,19	97,23	97,62	KHPI
	- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	63,48	76	78	KHPI

Kesesuaian RPJMD & Daya saing ACI

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			Kondisi Kinerja awal periode RPJMD	Target		Kesesuaian dengan Aspek Utama Daya Saing menurut ACI
			2015	2018	2019	
2.2.	Kesehatan					
	Angka Harapan Hidup		70,05	71	72	KHPI
	AKB (/1.000 KH)		36	26	24	KHPI
	AKI (/100.000 KH)		357	317	309	KHPI
	Angka Kematian Balita		156 kasus	135	130	KHPI
	Prevalensi Balita Kurang Gizi (Underweight)		19,16	17,36	17	KHPI
	Angka penemuan kasus TB (semua tpe yang dilaporkan / case notification rate) per 100.000 penduduk		76	137	154	KHPI
	Angka kesakitan positif malaria (API) per 1000 penduduk		0,45	0,2	0,1	KHPI
	Prevelansi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun		0,49	0,49	0,49	KHPI
	Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk		52	47	46	KHPI

Kesesuaian RPJMD & Daya Saing ACI

ASPEK PELAYANAN UMUM

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Kinerja awal periode RPJMD	Target		Kesesuaian dengan Aspek Utama Daya Saing menurut ACI
		2015	2018	2019	
ASPEK PELAYANAN UMUM					
1 Fokus Layanan Urusan Wajib					
1.1	Pendidikan Dasar				
	Angka Partisipasi Sekolah 7 – 12 tahun	99,03	100	100	KHPI
	Angka Partisipasi Sekolah 13 – 15 tahun	90,99	95	96	KHPI
1.2	Pendidikan Menengah				
	Angka Partisipasi Sekolah 16 -18	64,36	75	77	KHPI
1.3	Kesehatan				
	Rasio Puskesmas	3,68	3,86	3,89	KHPI
	Obat perkapita	8.051	12.000	12.500	KHPI
	Rasio Dokter per 100 rb pddk	12	16	17	KHPI
1.4	Pekerjaan Umum				
	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	61,75	80	85	KHPI
	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi Lampung	Sesuai	Sesuai	Sesuai	KHPI
	Kondisi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap yang terpelihara (%)	55	100	100	KHPI
	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya dari kebutuhan yang akan di bangun(%)	8	18	20	KHPI

Kesesuaian RPJMD & Daya Saing ACI

ASPEK PELAYANAN UMUM

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Kinerja awal periode RPJMD	Target		Kesesuaian dengan Aspek Utama Daya Saing menurut ACI
		2015	2018	2019	
ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Fokus Layanan Urusan Wajib				
1.5	Ketenagakerjaan				
	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	64,84	66,27	66,46	KKBT
1.6.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
	Tingkat Inflasi (%)	7,56	5,4	4,75	SEM
	Persentase penduduk miskin	14,86	11,7	11,1	KHPI
	Skala Kepuasan Layanan Masyarakat (skala 1-10)	5,88	6,85	7	PIP
	Indeks kedalaman kemiskinan	2.395	1,6	1,4	KHPI
	Indeks keparahan kemiskinan	0,53	0,28	0,34	KHPI
	Jumlah PMKS yang ditangani (jiwa)	8.975	8.120	8.220	KHPI

Fokus Layanan Urusan Wajib (lanjutan)

Kesesuaian RPJMD & Daya Saing ACI

ASPEK PELAYANAN UMUM

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			Kondisi Kinerja awal periode RPJMD	Target		Kesesuaian dengan Aspek Utama Daya Saing menurut ACI
			2015	2018	2019	
2	Fokus Layanan Urusan Pilihan					
2.1	Pertanian, kehutanan, dan perikanan					
		Laju Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (%)	2,7	4,42	4,48	SEM
		Nilai Tukar Petani (NTP)	120,87	104,65	104,84	SEM
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	112	114,15	114,29	SEM
2.2	Energi dan Sumber Daya Mineral					
		Laju pertumbuhan sektor pertambangan (%)	1,86	2,38	2,5	SEM
2.3	Perdagangan					
		Pertumbuhan Ekspor Non Migas (%)	5,60%	6,5	6,7	SEM
		Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	1,66	4,76	5,24	SEM
2.4	Perindustrian					
		Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan(%)	7,46	7,45	7,46	SEM

Kesesuaian RPJMD & Daya Saing ACI

ASPEK DAYA SAING DAERAH

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Kinerja awal periode RPJMD	Target		Kesesuaian dengan Aspek Utama Daya Saing ACI
		2015	2018	2019	
ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah					
1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
	Daya beli masyarakat/PPP (Rp.000)	517.710	629.28.00	660.75	
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	80	90,5	92,5	
	Laju Pertumbuhan Investasi (Pemberntukan Modal Tetap Bruto/PMTB) Atas Dasar Harga Berlaku	9,04	13,24	14,56	SEM
	Pertumbuhan PAD (%)	3,76	3,26	3,28	PIP

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kesesuaian RPJMD & Daya Saing ACI

ASPEK DAYA SAING DAERAH

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Kinerja awal periode RPJMD	Target		Kesesuaian dengan Aspek Utama Daya Saing ACI
		2015	2018	2019	
1.2	Lingkungan Hidup				
	Kelas Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar	D	C	B	KHPI
	Jumlah hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik	N/A	27 – 30 hari baik/tahun	32 – 35 hari baik/tahun	KHPI
	Capaian Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Lampung (%)	28	31,00 – 34,00	34,00 – 35,00	KHPI
	Rasio elektrifikasi Perdesaan	100.00.00	100.00.00	100.00.00	KHPI
	Rasio elektrifikasi rumah tangga	72	81,04	83,47	KHPI
	Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak (%)	58,25	90,11	100	KHPI
	Tingkat kawasan permukiman kumuh (%)	2,28	0,53	0	KHPI
	Tingkat rumah tangga yang memiliki akses terhadap lingkungan permukiman yang sehat	58,928	79,82	100	KHPI
	Tingkat rumah layak huni (%)	30	55	60	KHPI
	Jumlah perusahaan yang menjadi peserta PROPER	80	130	140	KHPI
	Tingkat pencemaran air pada sungai utama (%)	55	30	25	KHPI
	Luas rehabilitasi hutan dan lahan termasuk mangrove (Hektar)	67.211	152.831	175.770	KHPI

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah (lanjutan)

Kesesuaian RPJMD & Daya Saing ACI

ASPEK DAYA SAING DAERAH

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Kinerja awal periode RPJMD	Target		Kesesuaian dengan Aspek Utama Daya Saing menurut ACI
		2015	2018	2019	
1.3	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
	Rasio angka kriminalitas terhadap jumlah penduduk	0,38	0,34	0,32	KHI
	Jumlah Raperda dan Pergub yang dihasilkan	10 Raperda dan 50 Pergub	10 Raperda dan 20 Pergub	30 Raperda dan 20 Pergub	PIP
	Penyelesaian kasus tanah (kasus/tahun)	6	6	6	PIP
	Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	C	B	BB	PIP
	Hasil Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	PIP
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	PIP
	Persentase hasil audit APIP yang terselesaikan (%)	30	80	90	PIP
	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Standar Atas Pelaksanaan tugas SKPD sesuai aspek dan pembinaan dan pengawasan (%)	70	20	10	PIP
	Konsistensi antar dokumen perencanaan (%)	100	100	100	PIP
	Akreditasi Kelembagaan Badan Diklat	B	B	A	PIP
	Indeks demokrasi	70.88	73	73,5	PIP

Kesesuaian RPJMD & Daya Saing ACI

ASPEK DAYA SAING DAERAH

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH			Kondisi Kinerja awal periode RPJMD	Target		Kesesuaian dengan Aspek Utama Daya Saing ACI
			2015	2018	2019	
1.4	Sumber Daya Manusia					
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		72,87	75,12	76,52	KHI
1.5	Ketenagakerjaan					
	Rasio ketergantungan		50,1	46,6	46,75	KHI
	Laju Pertumbuhan Penduduk		1,23	1,53 – 1,63	1,63 – 1,73	KHI
	Tingkat Pengangguran Terbuka		5,69	4,45	4,17	KFBT
	Indeks Pembangunan Gender		93,96*	69,00 – 70,00	70,00 – 70,50	
	Indeks Pemberdayaan Gender		67,24*	67,50 – 68,50	68,50 – 69,00	

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah (lanjutan)

Kesesuaian RPJMD & Daya Saing ACI

Disandingkan dengan Indikator ACI

Ada 86 Indikator RPJMD yang disandingkan dengan indikator ACI

Berkorelasi dengan Indikator ACI

Ada 78 indikator RPJMD yang berkorelasi dengan indikator ACI , tetapi tidak semua berkorelasi langsung

Indikator Spesifik OPD

Indikator ACI menggambarkan variabel pembangunan yang lebih luas, indikator RPJMD lebih mencerminkan indikator spesifik dari OPD.

Beberapa indikator RPJMD tidak linear dengan indikator ACI seperti

Aspek Kesehatan

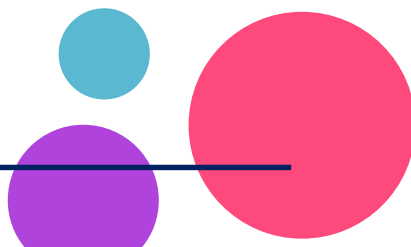
Pada aspek kesehatan indikator RPJMD lebih spesifik tetapi tidak menggambarkan secara umum, contohnya: ACI menggunakan indikator penduduk per pekerja medis (dokter, bidan, mantri dll) sementara RPJMD hanya menggunakan indikator rasio dokter per 100 ribu penduduk. ACI menggunakan indikator rasio penduduk per fasilitas kesehatan (RS, puskesmas, klinik, posyandu dll) sementara RPJMD hanya menggunakan indikator rasio puskesmas per 100 ribu penduduk.

Indikator Mencerminkan Kualitas Kesehatan

Prevalensi Balita Kurang Gizi (*Underweight*), Angka penemuan kasus TB per 100.000 penduduk, Angka kesakitan positif malaria (API) per 100.000 penduduk, Prevelansi HIV AIDS per 100 penduduk usia > dari 15 tahun, Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk

Indikator Harapan Hidup

Indikator yang mencerminkan Indikator Harapan Hidup menjadi indikator tersendiri dalam RPJMD: AKB, AKI, Angka Kematian Bayi.



8 indikator RPJMD yang tidak ada di ACI yaitu:

- ☐ Jumlah Koperasi Aktif
- ☐ Jumlah UMKM
- ☐ Jumlah Wisatawan Nusantara
- ☐ Jumlah Wisatawan Mancanegara
- ☐ Daya Beli Masyarakat
- ☐ Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
- ☐ Indeks Pembangunan Gender
- ☐ Indeks Pemberdayaan



Beberapa indikator **RPJMD** tidak ada di **ACI** dan **Indikator ACI** Belum tercover dalam **RJPMD**



Indikator ACI belum tercover dalam indikator RPJMD

- ☐ Promosi dan Pengelolaan Investasi
- ☐ Kebijakan dan Ketahanan Fiskal Pemerintah (5 Indikator)
- ☐ Kemampuan Finansial dan Efisiensi Bisnis (12 Indikator)
- ☐ Kinerja Produktivitas (5 Indikator)
- ☐ Infrastruktur Teknologi (9 Indikator)
- ☐ Infrastruktur Fisik (ada 7 Indikator dari 13 Indikator)

Kesesuaian RPJMD & Daya Saing ACI

Tergambar di Beberapa Indikator

Satu indikator di ACI tergambar menjadi beberapa indikator di dalam RPJM, contoh indikator kualitas lingkungan hidup, kualitas infrastruktur fisik, PDRB industri primer, dll

Sektor Perdagangan

RPJMD pada sektor perdagangan hanya memotret pertumbuhan ekspor non migas dan laju pertumbuhan sektor perdagangan, ACI memotret: ekspor non migas, impor non migas, keterbukaan dalam perdagangan

Perlu Kontribusi Stakeholders

Beberapa indikator yang digunakan ACI bukan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, tetapi menjadi kontribusi stakeholders lainnya dalam pembangunan

ANALISIS POTENSI DAERAH LAMPUNG

5 Potensi Daerah Lampung



4 (EMPAT) BIDANG KEBIJAKAN

Berikut bidang kebijakan tersebut :

**Kebijakan Infrastruktur,
Pendidikan & Perhubungan**

**Kebijakan
Ketenagakerjaan**

Kebijakan Perindustrian

Kebijakan Sosial Politik



BIDANG KEBIJAKAN PRIORITAS

Indikator, Bidang Kebijakan, Aspek Daya Saing

SEM

Perindustrian

1. Produktivitas Industri Primer
2. Produktivitas Industri Sekunder
3. Produktivitas Industri Tersier
4. Ekspor, nonmigas

KFBT

Ketenagakerjaan

1. Jumlah Pekerja di Sektor Sekunder
2. Jumlah Pekerja di Sektor Tersier

PIP

Sosial Politik

Tingkat Keamanan

Indikator

Infrastruktur

KHPI

1. Kualitas dan kuantitas Infrastruktur
2. Infrastruktur Kesehatan
3. Infrastruktur Pendidikan

Pendidikan

Pendidikan

Perhubungan

1. Bongkar Muat Kargo di Pelabuhan
2. Jumlah Penumpang Pesawat

Rencana aksi: Infrastruktur

Rencana Aksi	OPD Terkait	Keterkaitan dengan RPJMD	Sasaran Untuk RPJMD 2019-2025
Peningkatan jumlah dan kualitas jalan dan jembatan	OPD Penanggung jawab: - Dinas Bina Marga OPD lain yang terkait - Dinas Pengairan & Pemukiman - Balitbangda - Bappeda	- Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi di kabupaten/kota - Peningkatan kemantapan jalan dan jembatan Provinsi di Kabupaten/kota - Penanganan gangguan infrastruktur jalan akibat bencana alam yang cepat dan tanggap	Sasaran Global (2030) - Terbangun nya infrastruktur yang yang adaptif, mendukung industri yang berkelanjutan dan meningkatkan inovasi
Peningkatan Jumlah dan kualitas infrastruktur kesehatan	OPD Penanggung jawab: - Dinas Kesehatan OPD lain yang terkait - Dinas Pengairan & Pemukiman - Balitbangda - Bappeda	- Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit - Terliharanya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit - Jumlah Puskesmas dan Tenaga kesehatan yang memperoleh binaan tentang kesehatan jiwa 1. Terpeliharannya sarana dan prasarana rumah sakit 2. Penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	Sasaran Global (2030) - Menjamin kesehatan dan kesejahteraan setiap manuisa pada semua lapisan umur Sasaran nasional - Akses air minum layak - Kawasan kota tanpa lingkungan kumuh - Akses sanitasa layak
Peningkatan Jumlah dan kualitas infrastruktur Pendidikan	OPD Penanggung jawab: - Dinas Pendidikan OPD lain yang terkait - Dinas Pengairan & Pemukiman - Balitbangda - Bappeda	- Rasio Jumlah Ruang lab dan perpustakaan /Jumlah SMP, SMA, SMK dan sarana prasarana lainnya - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA sederajat - Peningkatan APK perguruan tinggi;	Sasaran Global (2030) - Menjamin kesetaraan kualitas pendidikan dan pendidikan seumur hidup untuk semua



Rencana aksi: Perhubungan (1)

Rencana Aksi	OPD Terkait	Keterkaitan dengan RPJMD	Sasaran Untuk RPJMD 2019-2025
Peningkatan kapasitas pelabuhan domestik	OPD Penanggung jawab: - Dinas perhubungan OPD Lain yang terkait: - Dinas Bina Marga - Dinas Pengairan Pemukiman - Balitbangda - Bappeda	Program prioritas gubernur untuk membangun bandara dan pelabuhan laut yang berstandar internasional	Sasaran Global: - Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
Perbaikan manajemen pengelolaan pelabuhan domestik	OPD Penanggung jawab: - Dinas Perhubungan Instansi Lain yang terkait: - ASPD - Pelindo - Balitbangda - Bappeda	Belum masuk di RPJMD secara eksplisit	Sasaran Nasional: - Meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019 (2014: 954 km). - Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24 pelabuhan pada tahun 2019.



Rencana aksi: Perhubungan (2)

Rencana Aksi	OPD Terkait	Keterkaitan dengan RPJMD	Sasaran Untuk RPJMD 2019-2025
Peningkatan kapasitas bandara domestik	OPD Penanggung jawab: - Dinas Perhubungan Instansi Lain yang terkait: - Bandara Radin inten 2 - Balitbangda - Bappeda	Program prioritas gubernur untuk membangun bandara dan pelabuhan laut yang berstandar internasional	Sasaran Global: - Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Sasaran Nasional: - Meningkatnya jumlah bandara menjadi 252 pada tahun 2019 (2014: 210).
Penambahan rute penerbangan domestik dari dan ke Lampung	OPD Penanggung jawab: - Kementerian perhubungan	Belum masuk di RPJMD secara eksplisit	



Rencana aksi: Perhubungan (3)

Rencana Aksi	OPD Terkait	Keterkaitan dengan RPJMD	Sasaran Untuk RPJMD 2019-2025
Peningkatan kapasitas bandara internasional	OPD Penanggung jawab: - Kementerian Perhubungan OPD Lain yang terkait: - Dinas Perhubungan - Balitbangda - Bappeda	Belum masuk di RPJMD secara eksplisit	Sasaran Global: - Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua. Sasaran Nasional: - Meningkatnya jumlah bandara menjadi 252 pada tahun 2019 (2014: 210).
Penambahan rute penerbangan internasional dari dan ke Lampung	OPD Penanggung jawab: - Kementerian Perhubungan OPD Lain yang terkait: - Dinas Perhubungan - Balitbangda - Bappeda	Belum masuk di RPJMD secara eksplisit	



Rencana aksi: Perindustrian (1)

Rencana Aksi	OPD Terkait	Keterkaitan dengan RPJMD	Sasaran Untuk RPJMD 2019-2025
Peningkatan jumlah dan mutu produksi pertanian	OPD Penanggung jawab: - Dinas Pertanian, Tanaman pangan dan Holtikultura OPD Lain yang terkait: - PU Pengairan, - Badan Ketahanan Pangan Daerah - Balitbangda - Bappeda - Bakorluh	- Peningkatan produktivitas lahan pertanian - Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan. - Peningkatan Produksi Pertanian Hortikultura. - Meningkatnya nilai tambah serta akses pemasaran produk. - Meningkatnya kualitas dan akses sertifikasi/registrasi produk	Sasaran Global (2030): - Menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.
Peningkatan jumlah dan mutu produksi perkebunan, perikanan dan Peternakan	OPD Penanggung jawab: - Dinas Perkebunan - Dinas peternakan, - Dinas perikanan dan Kelautan OPD Lain yang terkait: - Balitbangda - Bappeda - Bakorluh	- Adopsi inovasi teknologi pekebunan (kelompok tani yang mengadopsi inovasi teknologi perkebunan) - Terwujudnya peningkatan produksi, produktivitas komoditas perkebunan - terwujudnya pengendalian, evaluasi, perencanaan dan monitoring penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan - terwujudnya pengembangan dan peningkatan kualitas SDM penyuluh dan petani	Sasaran Nasional (2019) - Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan. - Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, sertapengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (<i>safe use of waste water in agriculture</i>).
Pemasaran hasil produksi industri primer	OPD Penanggung jawab: - Dinas Perdagangan OPD Lain yang terkait: - Dinas Perindustrian - Balitbangda - Bappeda	- Meningkatkan pendapatan petani (Rp/ha/tahun) - Meningkatnya daya saing produk unggulan daerah - terwujudnya pengembangan jejaring kerjasama agribisnis dan kemitraan agribisnis pertanian, perikanan dan kehutanan	



Rencana aksi: Perindustrian (2)

Rencana Aksi	OPD Terkait	Keterkaitan dengan RPJMD	Sasaran Untuk RPJMD 2019-2025
Penguatan industri pengolahan (manufaktur)	OPD Penanggung jawab: - Dinas Perindustrian OPD Lain yang terkait: - Dinas Perdagangan - Dinas Koperasi UKM - Balitbangda - Bappeda	- Terlaksananya pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui penambahan IKM hingga 68.038 unit dengan penyerapan tenaga kerja IKM sebanyak 231.056 orang - Terlaksananya Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Sasaran Global: - Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.
Pemasaran hasil industri pengolahan	OPD Penanggung jawab: - Dinas Perdagangan OPD Lain yang terkait: - Dinas Koperasi dan UMKM - Dinas Perindustrian - Balitbangda - Bappeda	- Terwujudnya standarisasi dan perlindungan konsumen dengan meningkatnya penggunaan SNI wajib, pengawasan barang yang diperdagangkan, jumlah alat UTTP yang di tera hingga 12.400 unit serta peningkatan pasar tertib ukur - Terlaksananya program pengembangan sistem perdagangan dalam negeri melalui lancarnya sistem distribusi dan terpenuhinya kebutuhan pokok dan penting masyarakat serta meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Sasaran Nasional: - Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%). - Meningkatnya kontribusi industri manufaktur menjadi 21,6% terhadap PDB pada tahun 2019 (2015: 20,8%).



Rencana aksi: Perindustrian (3)

Rencana Aksi	OPD Terkait	Keterkaitan dengan RPJMD	Sasaran Untuk RPJMD 2019-2025
Pengembangan kawasan pariwisata,	OPD Penanggung jawab: - dinas Pariwisata OPD Lain yang terkait: - Dinas Pengairan dan Pemukiman - Dinas PU - Balitbangda - Bappeda	Tersedianya produk / ODTW yang nyaman dan mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan ke daerah Lampung. Dengan target lama tinggal wisman ; 2 – 5 / hari, wisnus: 1,5 – 3 / hari. Tingkat pengeluaran rata-rata wisnus ; 300 – 520 / orang hari, wisman; 650 – 1 juta / orang hari.	Sasaran Global: - Menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Sasaran Nasional - Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%). - Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).
Pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendukung industri pariwisata	OPD Penanggung jawab: - Dinas Bina Marga - Dinas PU OPD Lain yang terkait: - Dinas Pariwisata - Balitbangda - Bappeda	Belum masuk di RPJMD secara eksplisit	
Pemasaran potensi pariwisata Lampung	OPD Penanggung jawab: - Dinas Pariwisata OPD Lain yang terkait: - Dinas Koperasi & UMKM - Diskominfo - Balitbangda - Bappeda	Tersedianya sarana dan prasarana promosi serta kegiatan promosi, pemasaran pariwisata di dalam dan luar negeri yang mampu meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke daerah Lampung dengan target pertumbuhan rata-rata sebesar 10 – 15 % / tahun	



Rencana aksi: Perindustrian (4)

Rencana Aksi	OPD Terkait	Keterkaitan dengan RPJMD	Sasaran Untuk RPJMD 2019-2025
Peningkatan volume ekspor atas komoditi unggulan ke negara tujuan <i>existing</i>	OPD Penanggung jawab: - Dinas perdagangan OPD Lain yang terkait: - Dinas Perindustrian - Dinas Perkebunan, - Dinas Peternakan - Balitbangda - Bappeda	Terlaksananya program pengembangan sistem perdagangan dalam negeri melalui lancarnya sistem distribusi dan terpenuhinya kebutuhan pokok dan penting masyarakat serta meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Sasaran Global - Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020. Sasaran Nasional: - Meningkatnya pertumbuhan ekspor produk non migas 5% pada tahun 2019 (2015: -9,8%).
Peningkatan jumlah negara tujuan ekspor atas komoditi unggulan Lampung	OPD Penanggung jawab: - Dinas perdagangan OPD Lain yang terkait - Badan Promosi daerah - Balitbangda - Bappeda	Belum masuk di RPJMD secara eksplisit	



Rencana aksi: Ketenagakerjaan (1)

Rencana Aksi	OPD Terkait	Keterkaitan dengan RPJMD	Sasaran Untuk RPJMD 2019-2025
Pembukaan Lapangan Pekerjaan di bidang manufaktur	OPD Penanggung jawab: - BPMD - Dinas Perindustrian - Dinas Perdagangan - Dinas Koperasi & UMKM OPD Lain yang terkait: - Dinas Tenaga Kerja dan - Dinas Pendidikan - Balitbangda - Bappeda	Belum masuk di RPJMD secara eksplisit	Sasaran Global: - Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. - Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
Pembukaan Lapangan Pekerjaan di bidang konstruksi	OPD Penanggung jawab: - BPMD - Dinas PU OPD Lain yang terkait: - Dinas Pendidikan - Dinas Tenaga Kerja - Balitbangda - Bappeda	Belum masuk di RPJMD secara eksplisit	- Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
Peningkatan kapasitas dan jumlah tenaga kerja melalui pendidikan vokasi	OPD Penanggung jawab: - Dinas Pendidikan Instansi Lain yang terkait: - UNILA, POLINELA, ITERA - UIN Raden Intan	Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Sasaran Nasional: - Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%). - Terciptanya kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 tahun.
Fasilitasi pasar tenaga kerja untuk memudahkan pertemuan <i>labor supply</i> dan <i>labor demand</i>	OPD Penanggung jawab: - Dinas Tenaga Kerja Instansi yang terkait: - Pusat Karir dan Kewirausahaan UNILA, POLINELA, ITERA dan UIN Raden Intan	Belum masuk di RPJMD secara eksplisit	- Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.



Rencana aksi: Ketenagakerjaan (2)

Rencana Aksi	OPD Terkait	Keterkaitan dengan RPJMD	Sasaran Untuk RPJMD 2019-2025
Pembukaan Lapangan Pekerjaan di sektor pariwisata	OPD Penanggung jawab: - Dinas Tenaga Kerja OPD Lain yang terkait: - Dinas Pariwisata - Dinas Koperasi & UKM - Balitbangda - Bappeda	Belum masuk di RPJMD secara eksplisit	Sasaran Global: - Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. - Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. - Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan. Sasaran Nasional: - Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%). - Terciptanya kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 tahun. Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.
Peningkatan kapasitas dan jumlah tenaga kerja melalui pendidikan vokasi	OPD Penanggung jawab: - Dinas Pendidikan Intansi Lain yang terkait: - UNILA, POLINELA, ITERA - UIN Raden Intan	Belum masuk di RPJMD secara eksplisit	
Fasilitasi pasar tenaga kerja untuk memudahkan pertemuan <i>labor supply</i> dan <i>labor demand</i>	OPD Penanggung jawab: - Dinas Tenaga Kerja Instansi yang terkait: - Pusat Karir dan Kewirausahaan UNILA, POLINELA, ITERA dan UIN Raden Intan	Belum masuk di RPJMD secara eksplisit	



Rencana aksi: Sosial Politik

Rencana Aksi	OPD Terkait	Keterkaitan dengan RPJMD	Sasaran Untuk RPJMD 2019-2025
Penegakan hukum	OPD Penanggung jawab: - Biro Hukum - OPD Lain yang terkait: - Kepolisian - Kejaksaan - KemenkumHAM	Belum masuk di RPJMD secara eksplisit	Sasaran Global: - Menggalakkan kedaulatan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.
Peningkatan Kesadaran dan ketaatan terhadap Hukum	- Bina Mental - Kominfo		





Terima Kasih